



# Ringkasan Panduan<sup>1</sup> Keperantaraan Pasar

## Latar Belakang

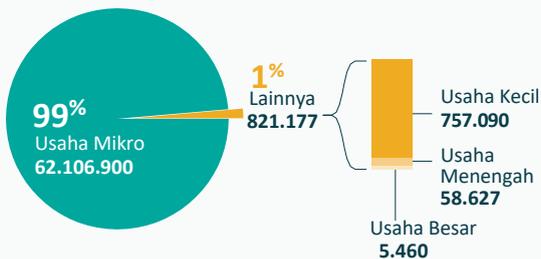
Sebagian besar rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai pemilik dan/atau tenaga kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

### DEFINISI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Skala Usaha	UU No. 20/2008		BPS
	Kekayaan Bersih <sup>a)</sup> [Rp.]	Omzet [Rp.]	Tenaga Kerja [orang]
Mikro	<50 juta	<300 juta	1-4
Kecil	50-500 juta	300 juta-2,5 milyar	5-19
Menengah	500 juta-10 milyar	2,5-50 milyar	20-99

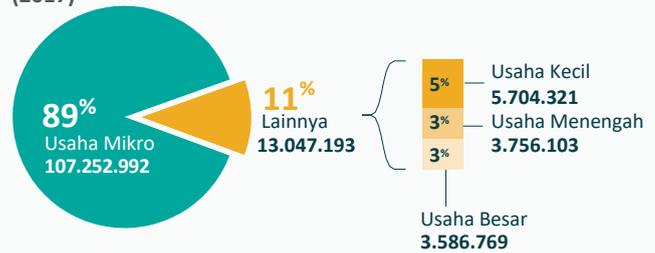
<sup>a)</sup> Tidak termasuk tanah & bangunan

### JUMLAH UNIT USAHA BERDASARKAN SKALA



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018)

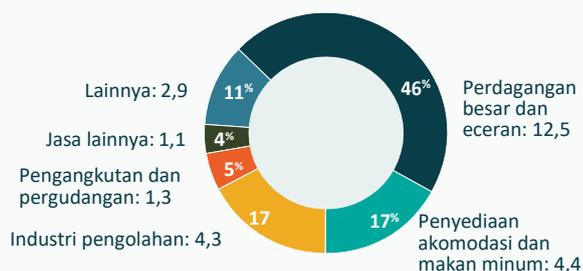
### SERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN SKALA USAHA (2017)



## Kendala Pertumbuhan UMK

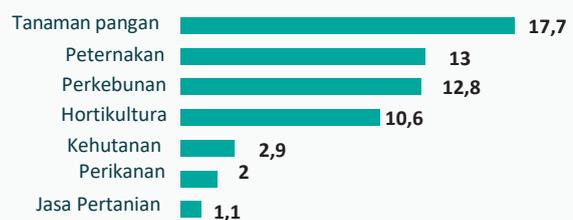
Di dalam kategori UMK, sub-kategori usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki kaitan yang paling erat dengan kemiskinan. Umumnya usaha mikro dimiliki oleh rumah tangga miskin atau hampir miskin, dijalankan oleh anggota rumah tangga sendiri tanpa upah, menggunakan teknologi dan pengelolaan sederhana, dan memiliki orientasi utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (subsistent) atau bertahan hidup (survival). Sedangkan usaha kecil memberikan lapangan pekerjaan di tingkat lokal bagi tenaga kerja upahan dengan kualifikasi rendah, namun telah memiliki orientasi komersial dan semangat kewirausahaan yang lebih kuat.

### JUMLAH DAN PROPORSI UMK NON-PERTANIAN BERDASARKAN KATEGORI LAPANGAN USAHA, (2016)



Sumber: BPS (2018) Sensus Ekonomi 2016

### SERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN SKALA USAHA (2013)

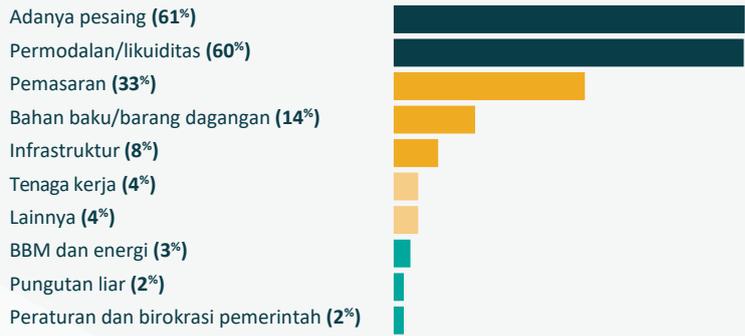


Catatan: 1 UMK bisa memiliki usaha di lebih dari 1 sub-sektor  
Sumber: BPS (2015) Sensus Pertanian 2013

<sup>1</sup> Dokumen ini merupakan ringkasan dari dokumen Panduan Keperantaraan Pasar. Untuk isi materi lengkap, silahkan untuk mengacu kepada dokumen panduan tersebut.

Dalam Sensus Ekonomi 2016, 78% UMK di Indonesia menyatakan memiliki berbagai kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Mayoritas menyampaikan lemahnya daya saing sebagai kendala terbesar, diikuti keterbatasan akses bahan baku dan pasar (fragmentasi rantai nilai) dan keterbatasan akses pembiayaan.

#### JENIS KENDALA USAHA YANG DIALAMI UMK

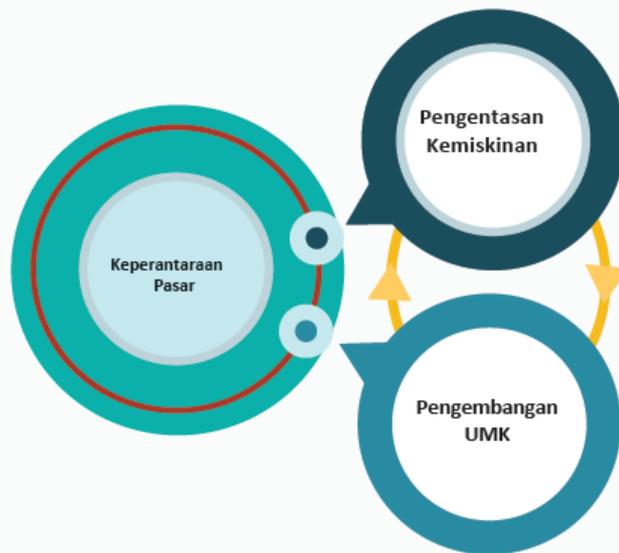


Sumber: BPS (2018) Potensi Usaha Mikro Kecil – Sensus Ekonomi 2016

### Keperantaraan Pasar (Market Linkages)

Program keberantaraan pasar dibangun di atas pendekatan sistem pasar yang memiliki 3 (tiga) aspek sentral: Kebersinambungan melalui perubahan sistemik, daya jangkau dan dampak pengentasan kemiskinan.

#### PENDEKATAN SISTEM PASAR



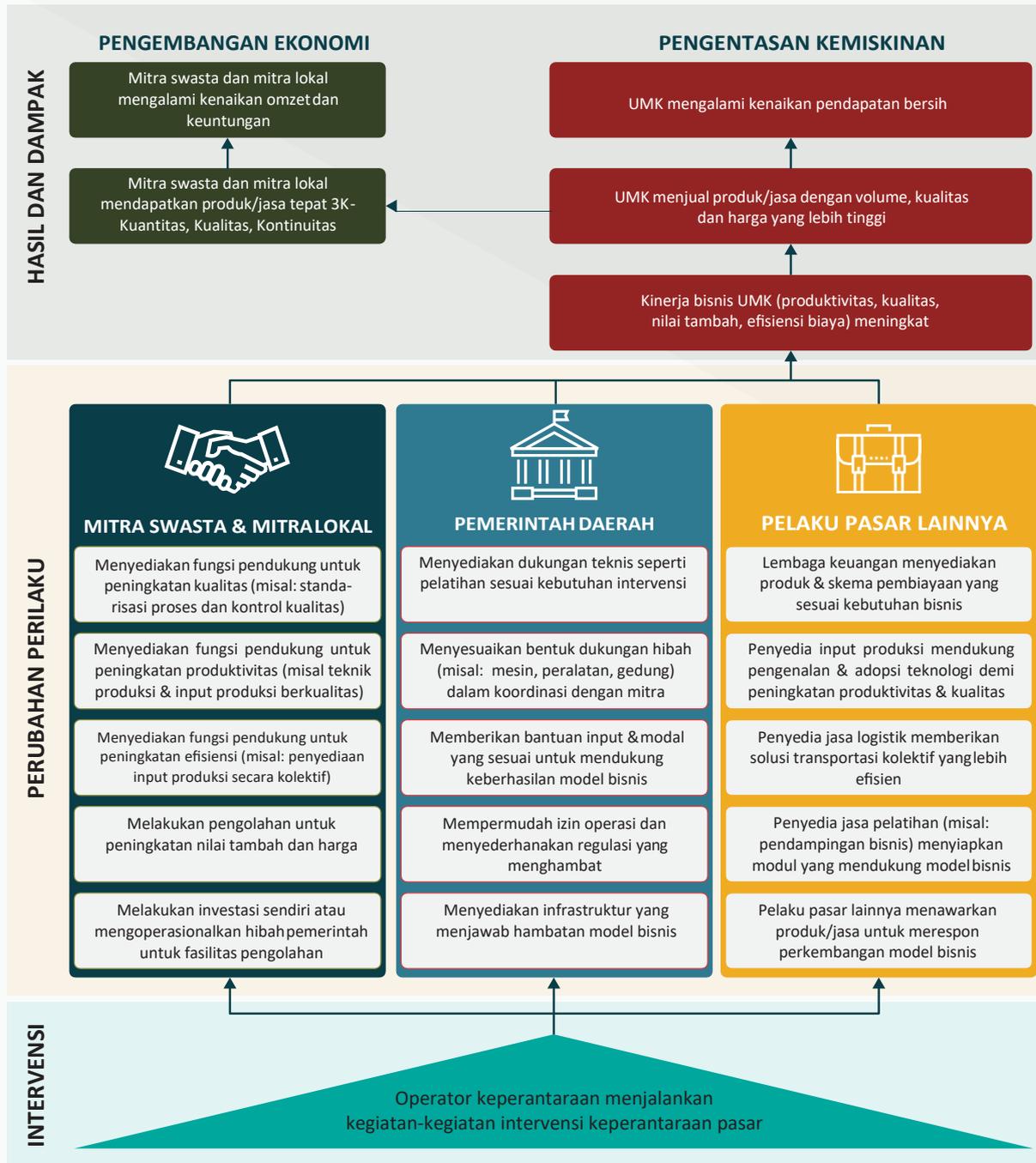
Melalui keberantaraan pasar 2 (dua) target nasional dapat dicapai yaitu pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMK.

## PERBEDAAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN UMK KONVENSIONAL DAN PENDEKATAN SISTEM PASAR

Konvensional	Karakteristik	Sistem Pasar
Komoditas ditentukan tanpa proses seleksi yang terstruktur dengan kriteria yang eksplisit dan basis data yang jelas	<b>Tahap Riset Komoditas</b> 	Pemilihan melalui proses seleksi yang sistematis dengan kriteria, pembobotan, dan penilaian yang terukur, serta sumber data yang kredibel
Analisis langsung menuju identifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran		Analisis dilakukan secara terstruktur meliputi kondisi dan tren pasar, pemetaan rantai nilai, dan identifikasi permasalahan beserta akar penyebabnya pada sistem pasar serta dampak yang dapat dihasilkan untuk penanggulangan kemiskinan
Intervensi ditentukan secara <i>top-down</i> oleh program atau <i>bottom-up</i> oleh fasilitator dan kelompok sasaran	<b>Tahap Perencanaan Intervensi</b> 	Intervensi direncanakan bersama oleh mitra perantara, perwakilan kelompok sasaran, dan mitra swasta ( <i>off-takers</i> ) dengan dukungan operator keperantaraan
Intervensi memberikan bantuan langsung untuk mengatasi permasalahan kelompok sasaran ( <i>direct delivery</i> atau <i>direct intervention</i> )		Intervensi menciptakan model bisnis yang menjawab akar penyebab pada fungsi rantai nilai, pendukung dan lingkungan bisnis
Bantuan langsung bersifat generik berupa modal kerja, investasi fisik (infrastruktur, peralatan) atau pelatihan		Bantuan spesifik sesuai kebutuhan pengembangan model bisnis, misalnya temu usaha untuk pembentukan jejaring rantai pasok, pengenalan SOP ( <i>Standard Operating Procedures</i> ) pemantauan kualitas, fasilitasi pendanaan oleh lembaga keuangan
Kebersinambungan solusi bergantung pada pemberian bantuan langsung yang didanai pemerintah		Kebersinambungan solusi dijamin oleh model bisnis yang saling menguntungkan secara komersial.
Biaya dan risiko sepenuhnya oleh program (dana pemerintah)		Biaya dan risiko ditanggung bersama oleh pemerintah, UMK, mitra lokal, dan mitra swasta ( <i>off-takers</i> )
Pengembangan skala ( <i>scaling-up</i> ) membutuhkan investasi pemerintah yang lebih besar		Pengembangan skala ( <i>scaling-up</i> ) ditopang oleh investasi ulang dari model bisnis yang menguntungkan, serta <i>copying</i> oleh UMK dan mitra lokal lainnya maupun <i>crowding-in</i> oleh pelaku pasar lainnya
Monitoring berfokus pada indikator di tingkat input (misal: nilai penyaluran dana), aktivitas (misal: jumlah kegiatan pelatihan), dan output (misal: jumlah peserta pelatihan)	<b>Tahap Implementasi dan Pengukuran Hasil</b> 	Selain di tingkat input, aktivitas, dan output; monitoring melacak indikator perubahan perilaku (misal: nilai investasi mitra swasta) dan dampak (misal: peningkatan omzet mitra dan pendapatan kelompok sasaran).
Evaluasi dilakukan pada tengah program ( <i>mid-term</i> ) dan akhir program dengan tujuan utama pelaporan		Evaluasi dilakukan setiap 1 atau 2 siklus produksi dengan tujuan memahami keberhasilan/kegagalan dan faktor-faktor penyebabnya agar kinerja model bisnis dapat terus ditingkatkan

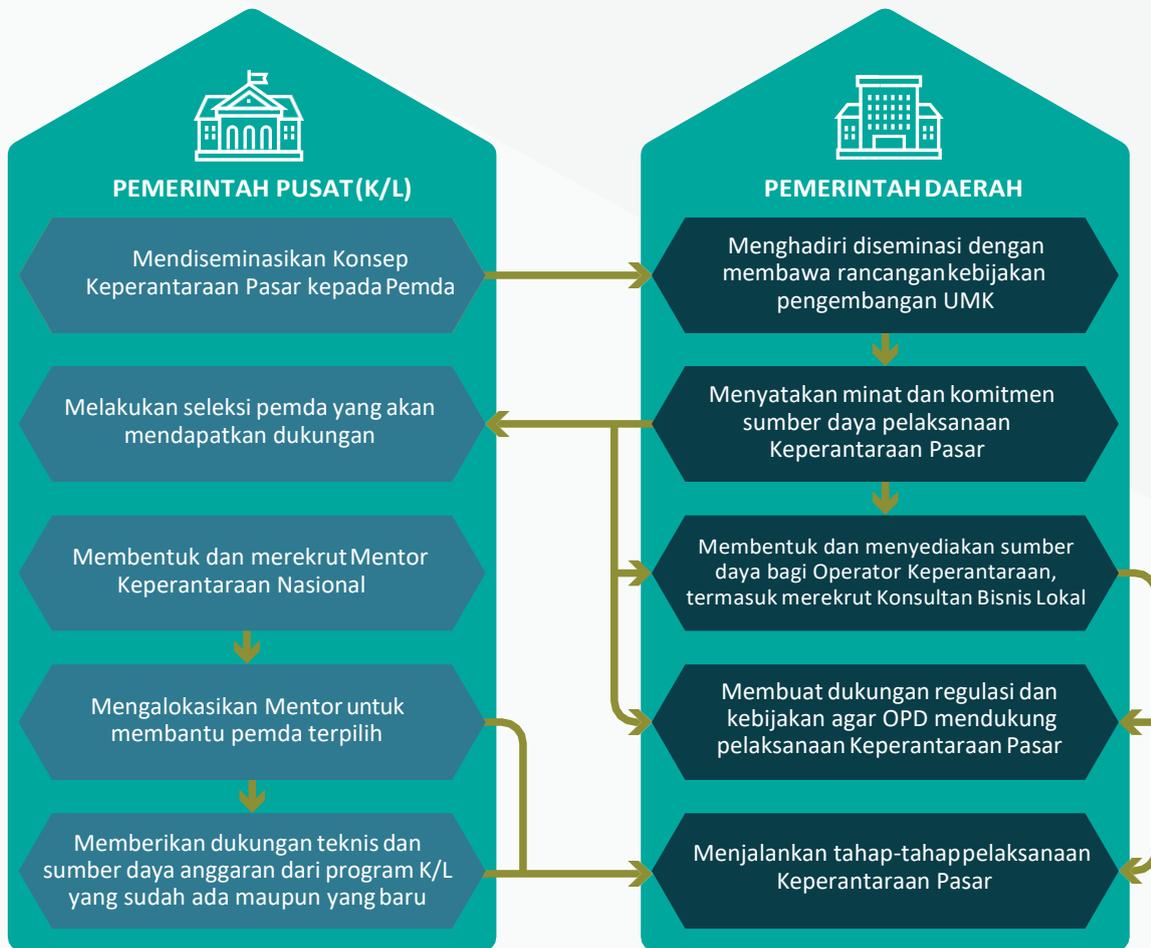
Intervensi keperantaraan pasar bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku, kepada para pelaku di sistem pasar, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan daya saing pada UMK, sehingga akan berdampak terhadap pengentasan kemiskinan, serta kepada Mitra Swasta dan Mitra Lokal, yang kemudian juga akan berdampak pada pengembangan ekonomi.

LOGIKA DAMPAK KEPERANTARAAN PASAR



Proses pelaksanaan keperantaraan pasar terdiri dari kegiatan persiapan dan 3 tahap utama: Riset Komoditas, Perencanaan Intervensi, dan Implementasi dan Pengukuran Hasil.

### KEGIATAN PERSIAPAN KEPERANTARAAN PASAR



### PROSES KEPERANTARAAN PASAR



## TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK DALAM KEPERANTARAAN PASAR

Tahap	Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Mentor Keperantaraan	Pemerintah Daerah melalui Operator Keperantaraan	Mitra Swasta dan Mitra Lokal
Riset Komoditas 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghadiri diskusi seleksi dan analisis komoditas untuk melakukan observasi, memberikan input dan umpan balik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan riset komoditas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi dan masukan</li> </ul>
Perencanaan Intervensi 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>quality assurance</i> dan <i>strategic review</i> atas rencana intervensi</li> <li>Mengidentifikasi calon mitra swasta di tingkat nasional atau regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan perencanaan intervensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat model bisnis, kalkulasi bisnis, dan rencana intervensi dengan bantuan konsultan bisnis lokal</li> </ul>
Implementasi dan Pengukuran Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi lintas lokasi dan memfasilitasi pembelajaran bersama, termasuk <i>best practices</i></li> <li>Memberikan rekomendasi <i>scale-up</i> dan replikasi intervensi di tingkat provinsi/nasional</li> <li>Melakukan pemutakhiran Panduan Keperantaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan dan memantau kegiatan intervensi bersama mitra sesuai kesepakatan</li> <li>Menggunakan hasil pengukuran untuk memperbaiki kinerja intervensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan kegiatan intervensi sesuai kesepakatan</li> </ul>

Di dalam persiapan dan pelaksanaan keperantaraan pasar ada dua bagian kelembagaan penting yang memiliki tugas dan fungsi berbeda: Operator Keperantaraan dan Kementerian/Lembaga.

## FUNGSI FASILITASI OLEH OPERATOR KEPERANTARAAN DAN DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA





# Modul 1

## Riset Komoditas

### 1. TAHAP RISET KOMODITAS

Modul ini menjelaskan langkah-langkah untuk memilih dan menganalisis komoditas sebagai tahap awal dari proses keberantaraan pasar. Pemilihan komoditas dilakukan agar sumberdaya dapat terfokus pada komoditas yang paling potensial yaitu komoditas yang memiliki potensi paling besar untuk meningkatkan pendapatan penerima manfaat (dalam hal ini UMK atau rumah tangga miskin) dalam skala yang memadai dan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

#### LANGKAH-LANGKAH DALAM TAHAP RISET KOMODITAS



#### 1.1. SELEKSI KOMODITAS

Komoditas dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mencerminkan potensi pertumbuhan, potensi adanya kerjasama dengan sektor swasta dan potensi jumlah penerima manfaat dalam hal ini UMK (termasuk petani kecil, buruh, atau kelompok miskin lainnya). Selain itu, ada kriteria lain yang dapat dipertimbangkan seperti perspektif gender, inklusifitas, dampak lingkungan dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria ini perlu disepakati oleh para pihak yang relevan di daerah yang melaksanakan keberantaraan pasar.

#### LANGKAH 1.1.1. PENETAPAN KRITERIA, BOBOT DAN SKALA NILAI



### LANGKAH 1.1.2. PENGUMPULAN DATA



### LANGKAH 1.1.3. PENENTUAN PERINGKAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN



## 1.2. ANALISIS KOMODITAS

Analisis komoditas mencakup analisis atas potensi pertumbuhan berdasarkan tren permintaan dan penawaran, pemetaan pasar atau rantai nilai, serta mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi pintu masuk bagi solusi peningkatan pendapatan kelompok penerima manfaat.”

### LANGKAH 1.2.1. PEMBUATAN PROFIL KOMODITAS DAN PEMETAAN PASAR



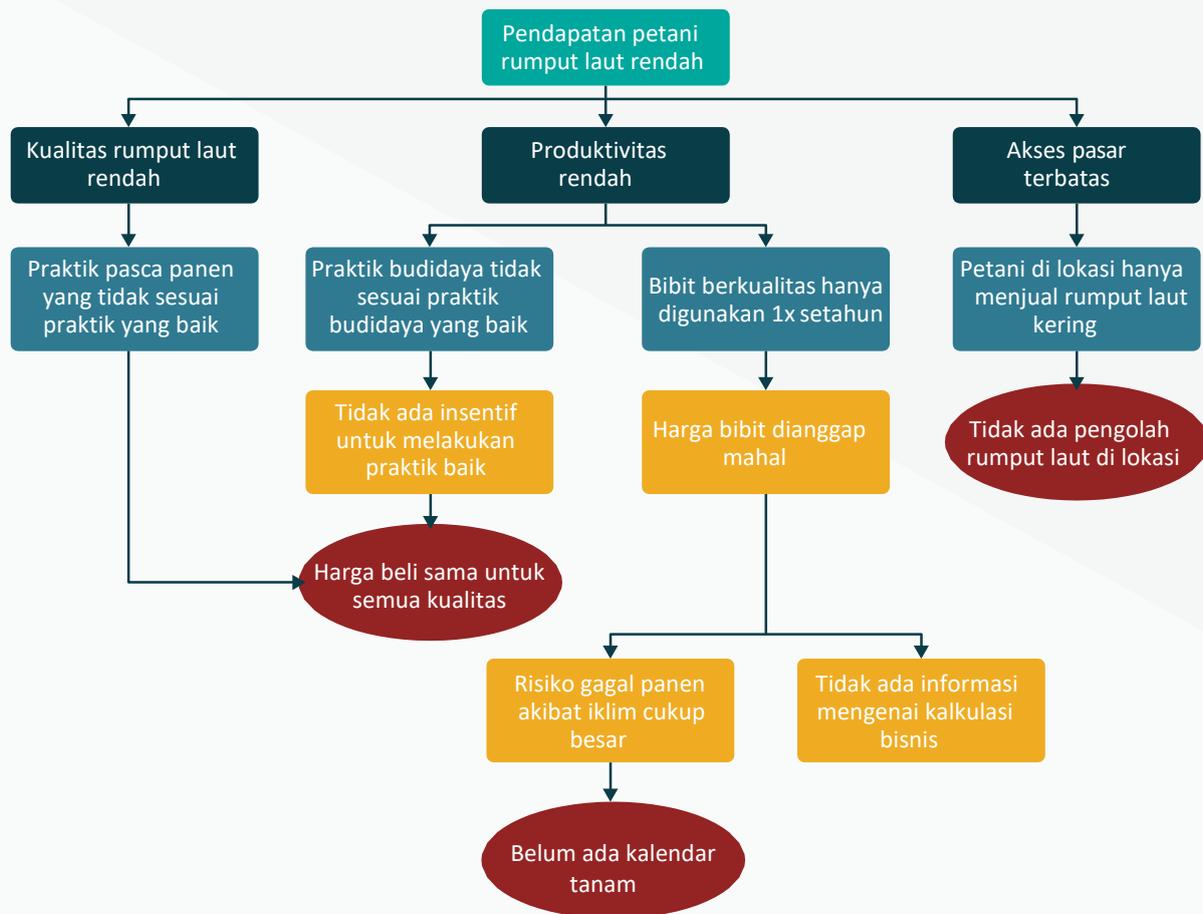
## PEMETAAN PASAR SECARA UMUM



### LANGKAH 1.2.1. PEMBUATAN PROFIL KOMODITAS DAN PEMETAAN PASAR



## CONTOH IDENTIFIKASI AKAR PERMASALAHAN (KOMODITAS RUMPUT LAUT)



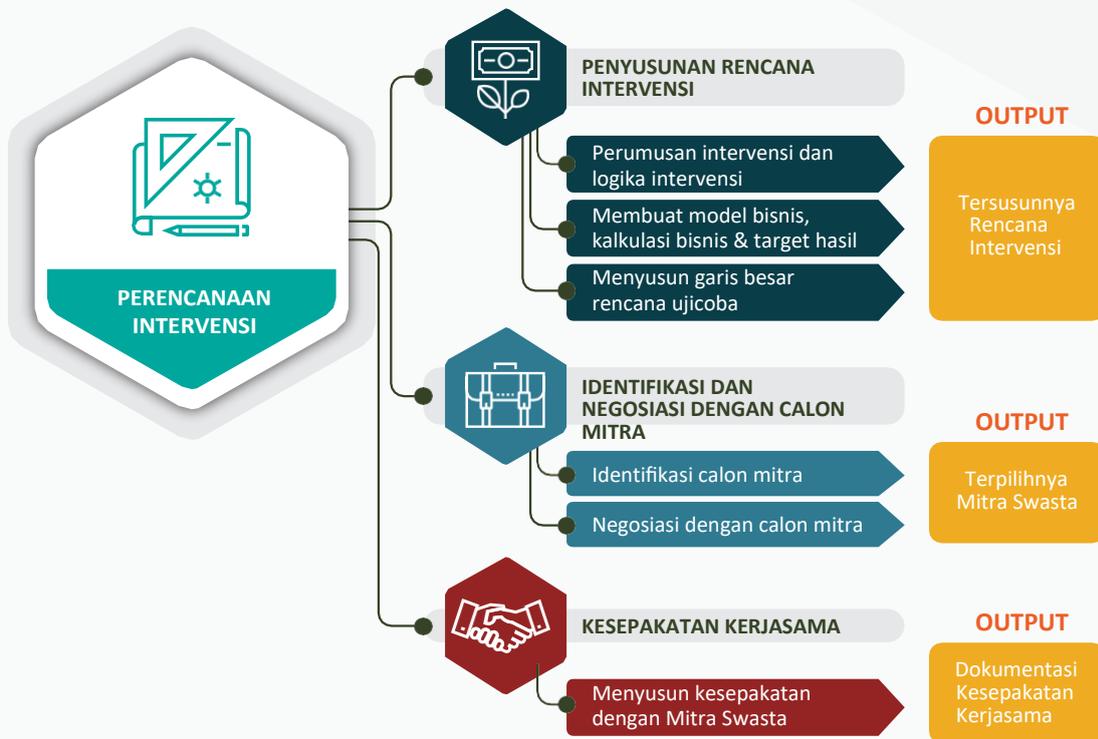


# Modul 2

## Perencanaan Intervensi

Modul ini menjelaskan tahap perencanaan intervensi terhadap komoditas yang telah dipilih dan dianalisis dalam tahap sebelumnya. Akar permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya akan dijawab melalui intervensi. Intervensi pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui suatu model bisnis.

### LANGKAH-LANGKAH DALAM TAHAP PERENCANAAN INTERVENSI



### 2.1. PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI

Bagian pertama dari perencanaan intervensi adalah merumuskan pernyataan intervensi secara jelas dan konkret serta memastikan bahwa alasan untuk melakukan intervensi adalah untuk menjawab akar permasalahan dan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan kelompok penerima manfaat. Selanjutnya, penyusunan logika intervensi dibuat untuk memastikan bahwa intervensi akan mencapai hasil yang diharapkan.

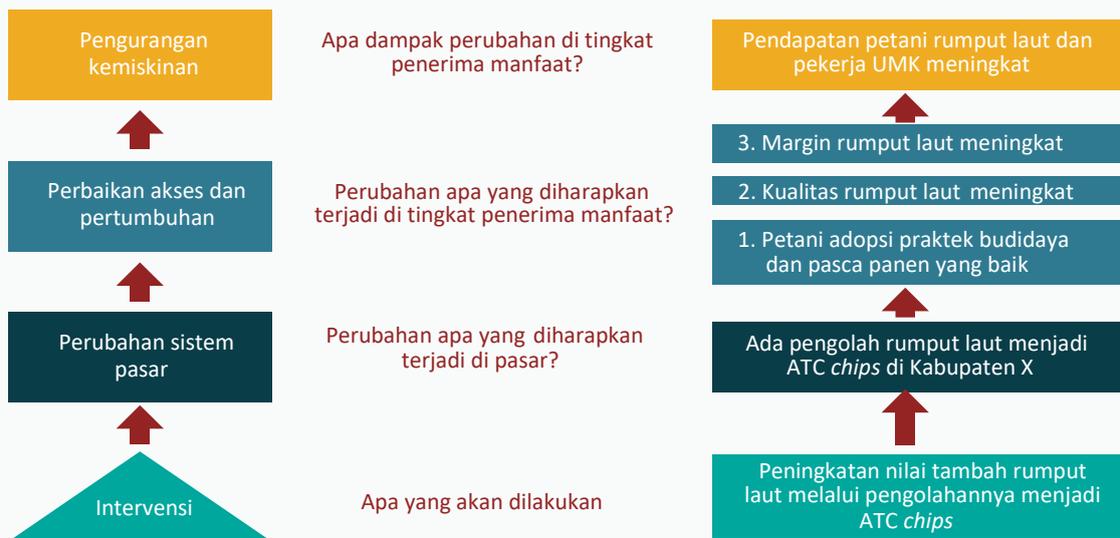
#### LANGKAH 2.1.1. PERUMUSAN INTERVENSI DAN LOGIKA INTERVENSI



## CONTOH PENGGALIAN AKAR MASALAH DARI AREA DIPILIH INTERVENSI YANG SUDAH DIPILIH



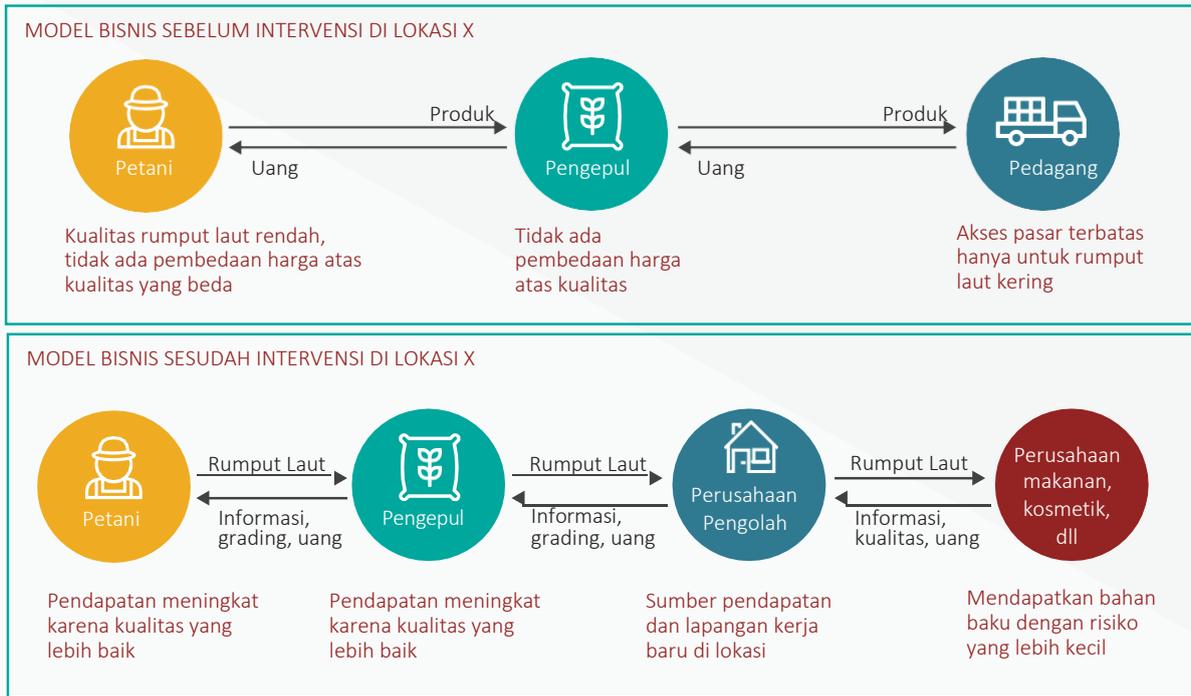
## CONTOH LOGIKA INTERVENSI



## LANGKAH 2.1.2. MEMBUAT MODEL BISNIS, KALKULASI BISNIS DAN ESTIMASI TARGET HASIL



## CONTOH MODEL BISNIS SEBELUM DAN SESUDAH INTERVENSI



### LANGKAH 2.1.3. MEMBUAT GARIS BESAR USULAN KEGIATAN UJI COBA



## CONTOH IDENTIFIKASI KEGIATAN UJI COBA BERDASARKAN MODEL BISNIS



## 2.2. IDENTIFIKASI DAN NEGOSIASI DENGAN CALON MITRA

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan bernegosiasi dengan calon mitra. Setiap intervensi memerlukan mitra yang merupakan pelaku usaha yang ada di dalam sistem pasar. Kunci utama untuk mendapatkan mitra potensial adalah insentif yang menarik. Dunia usaha sangat memperhitungkan insentif komersial pada saat mereka akan memutuskan untuk berinvestasi di dalam sebuah inovasi atau model bisnis baru.

### LANGKAH 2.1.1. PERUMUSAN INTERVENSI DAN LOGIKA INTERVENSI



## LANGKAH 2.2.2. NEGOSIASI DENGAN MITRA



## 2.3. KESEPAKATAN KERJASAMA

Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk mendokumentasikan kesepakatan atas kerjasama kegiatan uji coba antara Mitra Swasta atau Mitra Lokal dengan Operator Keperantaraan. Kesepakatan kerjasama ini mencakup kesepakatan mengenai kegiatan uji coba, target hasil, pembagian peran, pembagian pembiayaan (cost sharing) dari kegiatan uji coba dan lain sebagainya.

### LANGKAH 2.3.1 MENYUSUN KESEPAKATAN DENGAN MITRA SWASTA





# Modul 3

## Implementasi dan Pengukuran Hasil

Modul ini menjelaskan tahap implementasi/pelaksanaan intervensi dan pengukuran hasil dari intervensi tersebut. Implementasi intervensi pada dasarnya adalah pelaksanaan kegiatan uji coba seperti yang telah disepakati bersama dengan Mitra Swasta. Untuk memastikan bahwa kegiatan uji coba membawa hasil yang diharapkan dilakukan pengukuran terhadap hasil dari kegiatan tersebut.

### LANGKAH-LANGKAH DALAM IMPLEMENTASI DAN PENGUKURAN HASIL



### 3.1. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN UJI COBA

Bagian ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan uji coba dan bagaimana pemantauan sebaiknya dilakukan. Pemantauan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan untuk memonitor asumsi dan hasil atau perubahan yang diharapkan dari kegiatan uji coba. Asumsi yang mendasari model bisnis dan kalkulasi bisnis terutama terkait perilaku yang didorong oleh insentif akan diuji dalam pelaksanaan kegiatan uji coba.

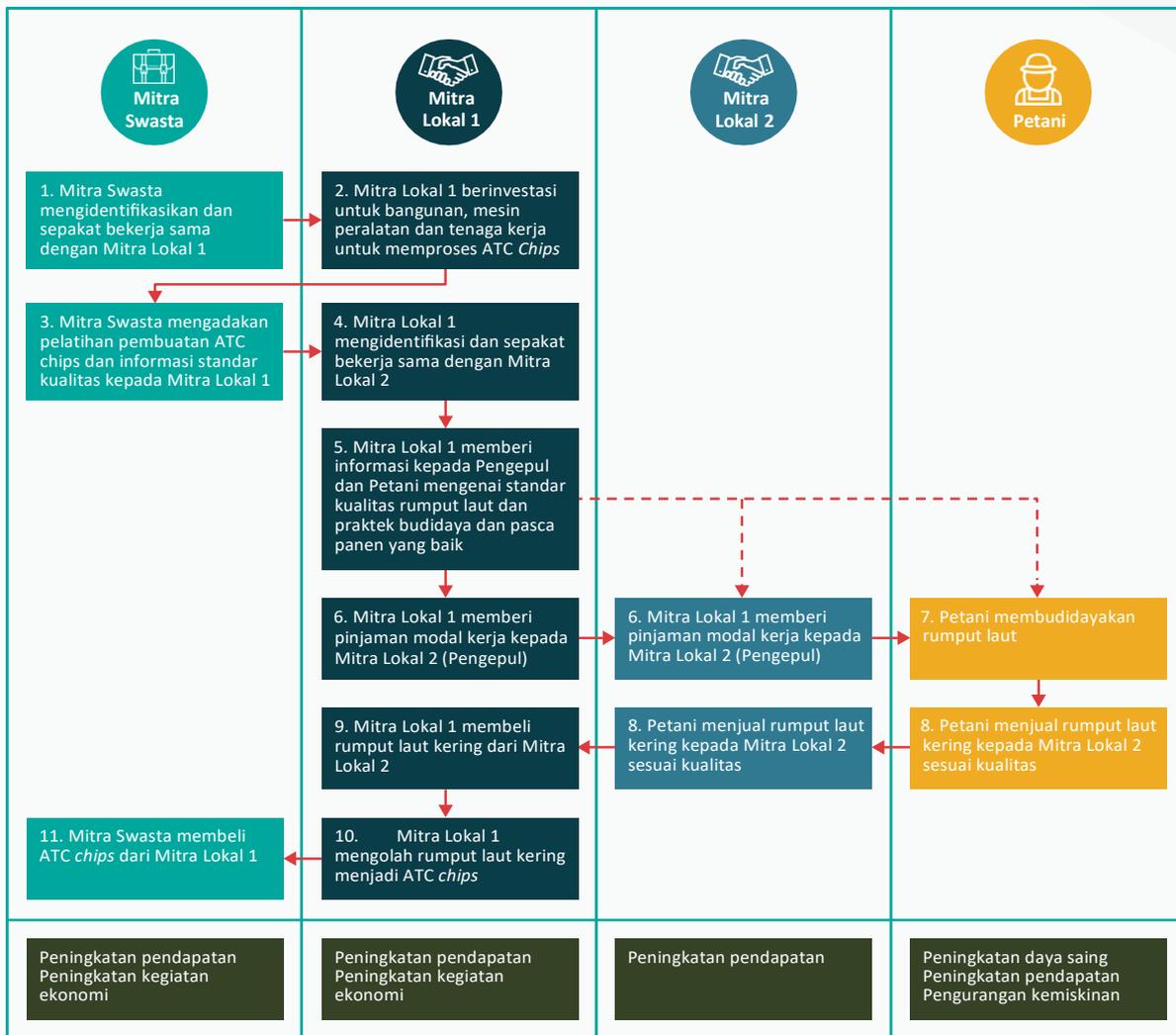
#### LANGKAH 3.1.1. PELAKSANAAN & PEMANTAUAN



### LANGKAH 3.1.2. MENGEMBANGKAN RANTAI KEGIATAN DAN INDIKATOR



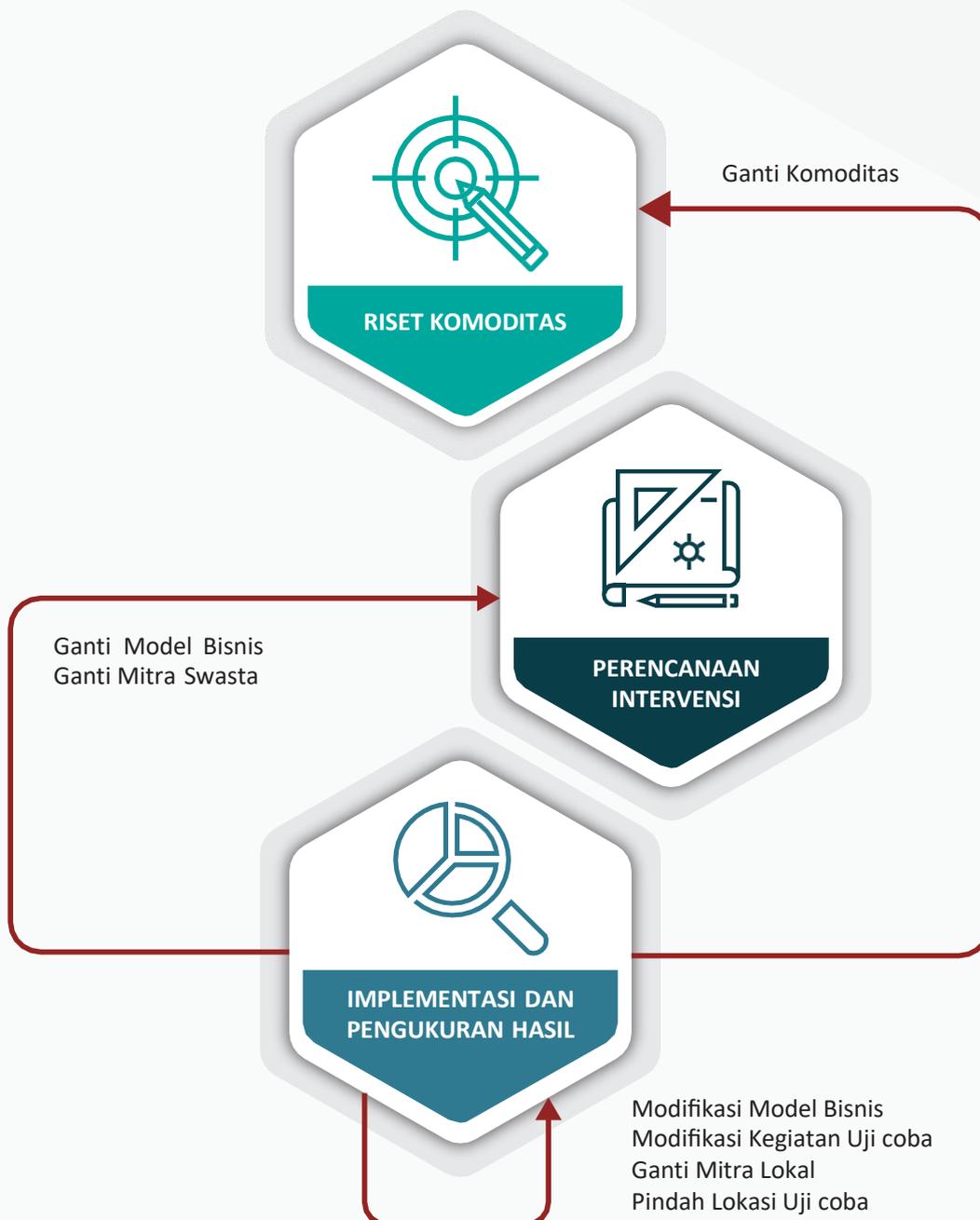
#### CONTOH RANTAI KEGIATAN



Pemantauan kegiatan uji coba dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat implementasi, perencanaan intervensi, atau pemilihan komoditas.

Bagan di bawah menunjukkan penyesuaian terhadap intervensi akibat adanya temuan. 1) Jika temuan terkait dengan kurang efektifnya intervensi akibat kegiatan atau lokasi uji coba atau mitra lokal yang kurang tepat, maka dapat dilakukan modifikasi terhadap satu atau beberapa kegiatan uji coba atau mengganti lokasi uji coba dan/atau mitra lokal. 2) Jika temuan terkait dengan model bisnis dan kalkulasi bisnis yang tidak sesuai realitas, maka dapat dilakukan penggantian model bisnis dan kalkulasi bisnis atau bahkan mitra swasta. 3) Jika temuan terkait dengan profil komoditas yang ternyata tidak sesuai dengan asumsi awal, maka dapat dilakukan penggantian komoditas

#### PEMANTAUAN DALAM SIKLUS PROSES KEPERANTARAAN



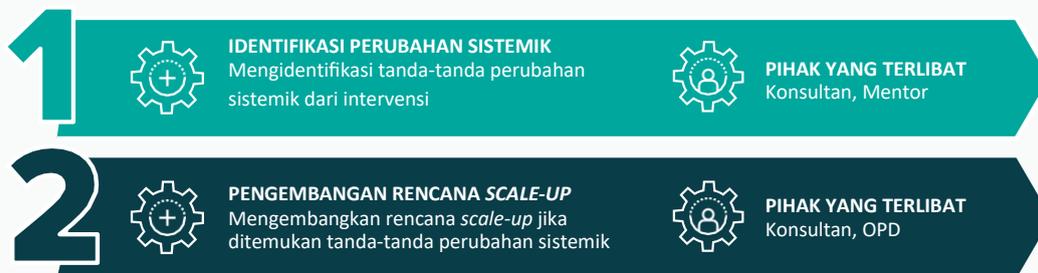
## 3.2. Pengukuran Hasil

Bagian ini menjelaskan pengukuran hasil dari kegiatan ujicoba. Pengukuran hasil dapat menjadi dasar untuk menilai apakah intervensi membawa dampak perubahan seperti yang diharapkan dan apakah ada perubahan sistemik yang terjadi. Perubahan sistemik dapat menjadi indikator bahwa model bisnis dari intervensi akan berkelanjutan.

### LANGKAH 3.2.1. PENGUKURAN HASIL DAN EVALUASI



### LANGKAH 3.2.2. IDENTIFIKASI PERUBAHAN SISTEMIK





# Modul 4

## Pembiayaan

Modul ini menjelaskan mengenai pembiayaan untuk kegiatan keperantaraan pasar mencakup kelembagaan Operator Keperantaraan dan intervensi. Operator Keperantaraan adalah unit atau tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengurangan kemiskinan melalui pendekatan keperantaraan pasar (*market linkage*). Konsultan Lokal atau Konsultan yang melaksanakan kegiatan keperantaraan pasar di daerah menjadi bagian dari Operator Keperantaraan.

### 4.1. Pembiayaan Kelembagaan Operator Keperantaraan

#### 4.1.1. Jenis Pembiayaan Kelembagaan Operator Keperantaraan

No.	Jenis Kegiatan yang Dibiayai	Rincian
1. Kegiatan Operasional	Konsultan Lokal	Gaji termasuk pajak, THR dan biaya lain sesuai peraturan tenaga kerja yang berlaku untuk membayar jasa Konsultan Lokal.
	Konsultan Nasional/ Mentor (sebagian)	Sebagian dari honorarium, pajak, THR dan biaya lain dari Konsultan Nasional. Sebagian lagi honorarium Konsultan Nasional dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau bersama daerah lain.
	Operasional Lainnya	Transport lokal (untuk kegiatan sehari-hari termasuk koordinasi, persiapan intervensi, pemantauan, dan lain-lain), komunikasi, fotokopi dan biaya lain-lain yang relevan.
2. Kegiatan Persiapan Intervensi (Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi)	Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas ke luar daerah termasuk transport, akomodasi, perdiem dan biaya-biaya lain selama perjalanan yang dilakukan Konsultan untuk keperluan persiapan intervensi (riset komoditas, penjajakan calon mitra, negosiasi dengan calon mitra, pemangku kepentingan lain, dan lain sebagainya).
	Konsumsi Pertemuan	Konsumsi pertemuan (FGD) dengan narasumber atau pemangku kepentingan jika perlu dalam rangka mengumpulkan informasi.
	Lain -lain	Lain-lain seperti fotokopi, pembelian data, dan lain-lain.

#### 4.1.2. Sumber Pembiayaan Kelembagaan Operator Keperantaraan

No.	Sumber Pembiayaan	Jenis Kegiatan yang Mungkin Dibiayai	Keterangan
1. APBD		Kegiatan operasional Operator Keperantaraan secara keseluruhan	Biaya operasional seperti gaji Konsultan Lokal, transpor, administrasi, logistik pertemuan dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.1 umumnya dibiayai oleh APBD.
		Mentor	Sebagian dari gaji atau honor Konsultan Nasional untuk menjamin kualitas selama dalam persiapan intervensi di daerah tersebut (Tahapan Pemilihan Komoditas dan Perencanaan Intervensi) dapat dibiayai APBD.
2. APBN		Dana stimulus bagi daerah untuk melakukan keperantaraan pasar	Daerah mungkin perlu dorongan untuk mencoba pendekatan keperantaraan pasar. Untuk itu, APBN dapat digunakan sebagai stimulus bagi daerah yang tertarik mencoba dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan yang dapat dicoba adalah melalui pengajuan Proposal Intervensi sesuai modul ini.
		Mentor	Sebagian dari kegiatan operasional Konsultan termasuk gaji/honor, perjalanan dinas, dan lain-lain dapat dibiayai oleh APBN melalui Kementerian (Bappenas atau Kementerian Teknis).
3. Donor		Sebagian kegiatan operasional Mentor dan Konsultan Lokal	Sepanjang tema atau komoditas sejalan dengan target dari suatu program atau proyek, lembaga donor mungkin bersedia membiayai sebagian dari kegiatan yang dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah baik terkait komoditas tertentu atau intervensi tertentu. Donor di sini termasuk kerjasama bilateral, multilateral atau melalui LSM internasional.

## 4.2. Pembiayaan Intervensi

### 4.2.1. Jenis Pembiayaan Intervensi

No.	Jenis Kegiatan yang Dibiayai	Keterangan
1. Biaya Intervensi dalam Skema <i>Co-Investment</i> yang Menjadi Tanggungan Operator Keperantaraan	Tenaga Ahli	Honorarium tenaga ahli, transpor, akomodasi, per diem.
	Promosi	Cetak brosur atau alat promosi, kegiatan promosi, potongan harga untuk periode tertentu, dan lain-lain untuk mempromosikan inovasi dari intervensi (produk, teknologi, praktek-praktek, dan lain-lain).
	Logistik Pertemuan	Termasuk konsumsi, sewa ruangan, sewa kursi dan lain-lain untuk memfasilitasi pertemuan untuk diskusi, sosialisasi, pelatihan dengan pihak-pihak yang terkait dengan intervensi.
2. Pengukuran Hasil yang Menjadi Tanggungan Operator Keperantaraan	Penelitian	Uang jasa lembaga peneliti, material penelitian, dan lain-lain terkait dengan inovasi yang akan dipromosikan oleh intervensi.
	Pengukuran Hasil	Pertemuan (FGD) dengan responden, biaya survey jika diperlukan, dan lain-lain terkait pengukuran hasil suatu intervensi.

### 4.4.2. Sumber Pembiayaan Intervensi

